

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, tinjauan pustaka yang akan penulis sajikan yaitu berupa kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Tinjauan pustaka ini terdiri dari teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, serta penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau perbandingan dalam melaksanakan penelitian. Penulisan berikutnya adalah pembahasan mengenai kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan model serta korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan pengajuan hipotesis yang menjadi dugaan dasar dalam upaya pemecahan masalah penelitian.

2.1.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets (dalam Jhingan, 2000:57), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi bagi para penduduknya. Definisi ini memiliki 3 komponen utama yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya persediaan barang; kedua, kemajuan teknologi merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi

secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut Sukirno (2010:10) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Karena itu konsep yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi adalah GDP dengan harga konstan. GDP adalah penjualan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan negeri maupun perusahaan asing yang beroperasi didalam negara tersebut pada suatu waktu/periode tertentu (Apridar, 2018:93).

Menurut Boediono (1999:8) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari perkembangan suatu perekonomian sehingga akan terjadi perubahan dari waktu ke waktu.

2. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kenaikan output per kapita dimana output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan ekonomi dikatakan tumbuh jika dalam waktu panjang (lima tahun) terjadi kenaikan output.

2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis para ahli di zamannya, pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi beberapa teori, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik, neo klasik, teori Schumpeter, dan teori pertumbuhan Solow-Swan

2.1.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: sumber daya manusia, jumlah stok barang-barang modal, sumber daya alam, serta teknologi yang digunakan. Kaum klasik berpendapat bahwa bertambahnya modal yang ada di masyarakat akan menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan ekonomi, karena keyakinan itu kaum klasik tidak memberikan perhatian kepada fungsi pembentukan modal dalam perekonomian, yaitu untuk memperbesar tingkat pengeluaran masyarakat (Adisasmita, 2013:58).

Adam Smith dan David Ricardo merupakan penganut pertumbuhan ekonomi klasik yang paling berpengaruh. Adam Smith menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu tersedianya sumber daya alam

dimana ketika sumber daya alam telah digunakan secara maksimal maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti, sumber daya manusia yaitu jumlah penduduk dimana proses pertumbuhan output memerlukan adanya tenaga kerja yang berasal dari masyarakat, persediaan barang modal yang berpengaruh terhadap produksi dalam proses pertumbuhan output, serta luas tanah. Adam Smith menekankan pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut David Ricardo dalam teori ini berlaku *the law of diminishing return*, artinya teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berlaku terus menerus karena semakin bertambahnya penduduk akan menyebabkan produksi marginal akan berkurang sehingga pendapatan nasional akan semakin mengalami perlambatan pertumbuhan, karena adanya tingkat penduduk yang tinggi akan menyebabkan upah menurun, sehingga menurunkan keuntungan dan menaikkan sewa tanah.

2.1.2.2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Penganut dari teori ini adalah Joseph Abramowitz Schumpeter dan Robert Solow. Menurut teori tersebut, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor produksi yaitu adanya proses inovasi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor input yaitu adanya akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan jumlah penduduk (Todaro dan Smith, 2009). Persamaan dari teori tersebut adalah sebagai berikut:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Di mana:

ΔY : tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK : tingkat pertumbuhan modal

ΔL : tingkat pertumbuhan penduduk

ΔT : tingkat perkembangan teknologi

Menurut kaum neo-klasik, laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan dalam penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pendapat ini sepenuhnya berpangkal pada pemikiran aliran klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa.

1. Teori Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan landasan pembangunan dan sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Schumpeter pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi

masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah pengusaha.

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, karena kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil resiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, maka akan tersedianya lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Selain itu, dengan adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal atau melakukan investasi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi maka produksi agregat akan bertambah. Kemudian, jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi, maka keinginan untuk melakukan inovasi akan berkurang. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa kebutuhannya telah tercukupi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat dan pada akhirnya mencapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationary rate*). Keadaan yang tidak berkembang ini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam

pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

2. Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Menurut Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Menurut teori ini rasio modal output (COR) dapat berubah dan bersifat dinamis dalam menciptakan sejumlah output tertentu.

2.1.3. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan membandingkan *Gross National Product* (GNP) dan *Gross Domestic Product* (GDP) pada tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Kedua tolak ukur ini membantu perhitungan total output perekonomian suatu negara. Adapun cara mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDB_t = PDB tahun t

PDB_{t-1} = PDB tahun sebelumnya

*tahun t = Tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya (berdasarkan harga konstan).

2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006:429-432), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang diperoleh, serta jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang dimiliki.

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan proses pertumbuhan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang mempunyai nilai dan dapat menguntungkan, hambatan seperti kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, dan kekurangan pengetahuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis kegiatan ekonomi (sebagai akibat dari pendapatan masyarakat yang rendah) akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan cepat.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang semakin bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara untuk menambah produksi. Di samping itu sebagai akibat dari pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara juga bergantung kepada jumlah pengusaha yang ada di negara tersebut. Apabila jumlah pengusaha lebih banyak, maka kegiatan ekonomi yang dijalankan akan lebih banyak juga.

Dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan penduduk terhadap luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan sektor perusahaan akan bertambah pula. Karena peranan ini maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada pertambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi.

Suatu negara dipandang menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Akibat dari ketidakseimbangan tersebut, produktivitas marginal penduduk akan rendah.

Apabila dalam perekonomian sudah berlaku keadaan dimana penambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi nasional yang tingkatnya lebih cepat dari tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita akan menurun. Dengan demikian penduduk yang berlebihan akan menyebabkan kemakmuran masyarakat menurun.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal yang jumlahnya telah bertambah, dan teknologi yang semakin modern memegang peranan yang penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, seperti:

- a. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan keefisienan dalam memproduksi suatu barang. Kemajuan seperti ini akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan jumlah produksi.
- b. Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Hal ini menyebabkan barang dan jasa yang digunakan masyarakat akan bertambah.
- c. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan kualitas barang-barang yang diproduksi tanpa menaikkan harga.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang, ahli-ahli ekonomi telah

menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius terhadap pembangunan. Adat istiadat yang masih tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi.

Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Apabila didalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus berusaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperluas fasilitas pendidikan dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

2.1.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan dari suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, nilai PDRB yang dihasilkan antar daerah bergantung kepada potensi faktor produksi daerah tersebut. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam menghitung PDRB, antara lain:

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, gas, dan air bersih
- e. Kontruksi
- f. Perdagangan, hotel, dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan

keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b. Pengeluaran konsumsi pemerintah
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. Perubahan inventori, dan
- e. Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah mencakup pajak tak langsung neto.

Ada dua cara dalam penyajian PDRB yaitu:

1. PDRB atas dasar harga berlaku, menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk dimana PDRB atas dasar harga berlaku merupakan tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah.

2. PDRB atas dasar harga konstan, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

2.1.6. Pendapatan Asli Daerah

2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan dari berbagai usaha pemerintah daerah, baik untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun dalam kegiatan pembangunannya. Menurut NN dalam K Datu (2012), pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menginsyarkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen

tersebut berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.6.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.6.2.1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban, dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan

kewenangannya. Menurut Undang-Undang No.34 Pasal 2 Tahun 2000 pembagian pajak daerah yaitu:

1. Pajak provinsi yang terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Jenis pajak kabupaten/kota yang terdiri dari:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - g. Pajak parkir

Menurut Waluyo dan Ilyas (2002:11) pengelompokan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, yaitu:

1. Pembagian berdasarkan golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan melewati pembayaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan ketetapan waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan ke pihak lain dan tidak dipungut secara periodik dan bersifat insidental. Contohnya pajak pertambahan nilai.
2. Pembagian menurut sifatnya
- a. Pajak subjektif, yaitu pungutan yang berasal dari orang pribadi dan telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Contohnya seperti pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif, merupakan jenis pajak yang tidak melihat kondisi dari wajib pajaknya melainkan dilihat dari sifat objek pajaknya. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
3. Pembagian menurut pemungutannya
- a. Pajak pusat, dipungut oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa, dan bea masuk dan bea keluar.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.

2.1.6.2.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam retribusi daerah, terdapat objek retribusi daerah yaitu berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi, yang dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Kemudian retribusi perizinan tertentu yaitu kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jasa pelayanan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum, antara lain:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan kebersihan dan persampahan
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- d. Pelayanan pasar
- e. Pelayanan air bersih
- f. Pengujian kendaraan bermotor
- g. Pengujian kapal perikanan

2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha, antara lain:

- a. Pemakaian kekayaan daerah
- b. Pelayanan terminal
- c. Penginapan
- d. Rumah potong hewan
- e. Tempat pendaratan kapal
- f. Tempat rekreasi dan olah raga
- g. Penyebrangan di atas air
- h. Pengolahan air limbah
- i. Penjualan usaha produksi daerah

3. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu, antara lain:

- a. Izin peruntukan penggunaan tanah
- b. Izin mendirikan bangunan (IMB)
- c. Izin gangguan
- d. Izin trayek
- e. Izin pengambilah hasil hutan

Retribusi dapat berpengaruh untuk pendistribusian pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagi beban masyarakat kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Karena itu sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk retribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

2.1.6.2.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.6.2.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah, diantaranya:

- a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau cicilan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- g. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- h. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- i. Pendapatan dari pengembalian
- j. Pendapatan hasil atas eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi

2.1.7. Industri

2.1.7.1. Pengertian Industri

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), pengertian industri adalah suatu proses perubahan bahan dasar menjadi barang jadi/dari barang yang kurang nilainya menjadi lebih tinggi nilainya dengan maksud sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan atau keuntungan. Menurut Undang-Undang RI No.5 pasal 1 tahun 1984 industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan

baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang bernilai ekonomi yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Adapun pengertian industri menurut para ahli yaitu: industri adalah semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang produktif/menghasilkan barang dan uang (George T. Ramer, 2004). Sedangkan menurut I Made Sandi (2002), industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian industri adalah kumpulan dari berbagai aktivitas yang sejenis dan memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan tenaga kerja serta peralatan lainnya untuk merubah barang agar dapat mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dalam pemakaiannya.

2.1.7.2. Klasifikasi Industri

2.1.7.2.1. Klasifikasi Industri Berdasarkan Tenaga Kerja

Sektor industri dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sektor industri kecil, industri sedang, dan industri besar yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Industri Kecil

Industri kecil merupakan sebuah industri yang melakukan kegiatan usahanya dengan mempekerjakan paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang, dengan nilai investasi seluruhnya sampai Rp.200.000.000.00,- diluar

bangunan dan tanah tempat usaha. Contoh industri kecil seperti kerajinan kayu, usaha kuliner rumahan dan kerajinan seni lukis dan pahat. Ciri industri kecil tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara, teknologi yang digunakan masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih berskala lokal.

2. Industri Sedang

Industri sedang yaitu suatu industri yang jumlah karyawannya antara 20 sampai 99 orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Ciri industri sedang memiliki modal yang cukup besar karena kapasitas produksinya besar, tenaga kerja memiliki keterampilan dalam bidangnya, dan pemimpin perusahaan memiliki kemampuan manajerial yang sangat penting untuk kemajuan industri. Semakin baik manajerial suatu perusahaan maka akan semakin mudah memperkirakan keadaan yang akan terjadi kedepannya dalam perusahaan tersebut. Contoh industri sedang seperti, industri pakaian jadi, industri sepatu, industri konveksi, dan industri kramik.

3. Industri Besar

Industri besar yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemeliharaan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pemimpin perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and profer test*). Contoh industri besar yaitu, industri tekstil, industri mobil, industri besi baja dan industri pesawat terbang.

4. Industri rumah tangga

Yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Contohnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu dan industri makanan ringan.

2.1.7.2.2. Klasifikasi Industri Berdasarkan Bahan Baku

Masing-masing industri memerlukan bahan baku yang berbeda, tergantung dari apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan baku yang dipakai, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Contohnya: industri hasil kehutanan, industri hasil perikanan, dan industri hasil pertanian.
2. Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain. Contohnya: industri pemintalan, industri kain, dan industri kayu lapis.
3. Industri fasilitatif atau tersier, adalah kegiatan industri yang menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya: perbankan, perdagangan, angkutan umum dan pariwisata.

2.1.7.2.3. Klasifikasi Industri Berdasarkan Produksi yang Dihasilkan

Berdasarkan produksi yang dihasilkannya, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat digunakan secara langsung. Contohnya: industri makanan dan minuman, industri anyaman, dan industri konveksi.
2. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum digunakan. Contohnya: industri baja, industri tekstil, industri ban, dan industri pemintalan benang.
3. Industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Contohnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan, dan industri pariwisata.

2.1.7.2.4. Klasifikasi Industri Berdasarkan Unit Usaha

Keberadaan suatu industri sangat menentukan sasaran atau tujuan kegiatan industri. Berdasarkan lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri berorientasi pada pasar (*market oriented industri*), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen.

2. Industri berorientasi pada tenaga kerja (*employment oriented industri*), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi tingkat pendidikannya rendah.
3. Industri berorientasi pada pengolahan (*supply oriented industri*), yaitu industri yang didirikan dekat atau ditempat pengolahan. Contohnya: industri semen di Palimanan Cirebon (dekat dengan batu gamping), industri pupuk di Palembang (dekat dengan sumber pospat dan amoniak), dan industri BBM di Balongan Indramayu (dekat dengan kilang minyak).
4. Industri berorientasi pada bahan baku (*materials oriented industri*), yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Contohnya: industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan Pelabuhan laut, dan industri gula berdekatan dengan lahan tebu.
5. Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (*footloose industri*), yaitu industri yang didirikan tidak terikat terikat oleh syarat-syarat di atas. Industri tersebut dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Contohnya: industri elektronik, industri otomotif, dan industri transportasi.

2.1.7.2.5. Klasifikasi Industri Berdasarkan Barang yang Dihasilkan

Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Contohnya: industri alat-alat berat, industri mesin, dan industri percetakan.
2. Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi. Contohnya: industri obat-obatan, industri makanan dan minuman.

2.1.7.2.6. Klasifikasi Industri Berdasarkan Subjek Pengelola

Berdasarkan subjek pengelolanya, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat, contohnya: industri makanan ringan dan industri kerajinan.
2. Industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik negara yang dikenal dengan istilah BUMN, contohnya: industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri peminyakan dan industri transportasi.

2.1.7.2.7. Klasifikasi Industri Berdasarkan Cara Pengorganisasian

Cara pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: modal, tenaga kerja, produk yang dihasilkan dan pemasarannya. Berdasarkan cara perorganisasiannya, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri modal relatif kecil, teknologi sederhana, tenaga kerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari

kalangan keluarga, produknya masih sederhana dan lokasi pemasarannya masih berskala kecil. Contohnya: industri kerajinan dan industri makanan ringan.

2. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri modal relative besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 20- 99 orang, tenaga kerja tidak tetap dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas. Contohnya: industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak.
3. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya dalam skala nasional atau internasional. Contohnya: industri elektronik, industri otomotif, industri transportasi dan persenjataan.

Selain pengklasifikasian industri di atas, terdapat juga pengklasifikasian industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/1/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut:

1. Aneka Industri

Industri kecil ini merupakan industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut:

- a. Industri tekstil, seperti: benang, kain, dan pakaian jadi.

- b. Industri alat listrik dan logam, seperti: kipas angin, kulkas, mesin jahit, dan televisi.
- c. Industri kimia, seperti: sabun, pasta gigi, sampo, dan obat-obatan.
- d. Industri pangan, seperti: minyak goreng, terigu, gula, teh, kopi, dan makanan kemasan.
- e. Industri bahan bangunan dan umum, seperti: kayu gergajian, kayu lapis, dan marmer.

2. Industri Kecil

Industri ini merupakan industri yang bergerak dengan jumlah tenaga kerja sedikit, dan teknologi sederhana. Biasanya dinamakan industri rumah tangga, seperti: industri kerajinan, industri alat-alat rumah tangga, dan perabotan dari tanah (gerabah).

2.1.7.3. Faktor-faktor Pembangkit Industri

1. Struktur organisasi

Sebagai pihak yang membawa, mengubah, mengembangkan dan menyebar luaskan teknologi perlu dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor.

2. Ideologi

Perlunya sikap untuk menentukan pilihan dalam mengembangkan suatu teknologi.

3. Kepemimpinan

Pemimpin harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.7.4. Faktor-Faktor Penghambat Industri

Faktor-faktor penghambat industri meliputi:

1. Keterbatasan Teknologi

Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Terbatasnya tenaga profesional menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru.

3. Keterbatasan Dana Pemerintah

Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi.

2.1.7.5. Dampak Industrialisasi

1. Meningkatkan devisa negara dan infrastruktur.

2. Berkurangnya cadangan sumber daya alam dan meningkatnya pencemaran lingkungan.

2.1.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.1.8.1. Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pengertian tingkat partisipasi angkatan kerja berbeda dengan pengertian partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja merujuk kepada persentase jumlah angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan sedangkan partisipasi angkatan kerja berarti keikutsertaan dalam atau mempunyai pekerjaan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja yaitu penduduk yang telah berusia 15-64 tahun yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Secara umum, manfaat tingkat partisipasi angkatan kerja adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perbandingan dari jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja menghasilkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah sebuah indikator dari kebijakan yang diterapkan untuk mengukur kuantitas angkatan kerja aktif mencari pekerjaan dan bekerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sementara, penduduk yang

bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan yang bukan bekerja.

Rumus tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas)}} \times 100\%$$

Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan keikutsertaan tenaga kerja dalam bekerja baik secara formal maupun secara nonformal. Tenaga kerja adalah salah satu pendorong untuk pertumbuhan ekonomi, jika diimbangi dengan lapangan kerja yang luas. Dimana ketika tenaga kerja yang banyak serta diimbangi dengan lapangan kerja yang luas maka produksi akan semakin meningkat yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2.1.8.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu:

1. Jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah dan semakin banyak anggota dalam setiap keluarga yang mengurus rumah tangga, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja.

2. Tingkat penghasilan keluarga

Keluarga yang memiliki penghasilan relatif tinggi cenderung untuk memperkecil anggota keluarganya untuk bekerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi rendah. Sebaliknya keluarga yang memiliki biaya hidup yang besar, cenderung untuk melibatkan jumlah anggota keluarganya untuk bekerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat.

3. Tingkat umur

Penduduk yang umurnya masih muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga, bahkan mereka masih bersekolah. Oleh sebab itu tingkat partisipasi angkatan kerja relatif rendah.

4. Tingkat upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk ke pasar kerja sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja akan semakin tinggi.

5. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar kesempatan untuk diterima kerja. Keadaan ini mengakibatkan tingkat partisipasi angkatan kerja semakin besar.

6. Kegiatan perekonomian

Semakin bertambahnya kegiatan perekonomian maka tingkat partisipasi angkatan kerja akan semakin besar.

2.1.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penula mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperkuat dan membandingkan hasil analisis yang dilakukan

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian
1.	Analisis Kointegrasi Jumlah Wisatawan, Inflasi, dan Nilai Tukar Terhadap PDRB Provinsi Bali (made Aristiawan Jiwa Atmaja, dkk 2015).	Variabel Independen: - Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen: - Jumlah Wisatawan Inflasi - Nilai Tukar Variabel Dependen: -	Berdasarkan hasil uji kointegrasi mengindikasikan bahwa diantara jumlah kunjungan wisatawan, inflasi, nilai tukar dan PDRB tidak terdapat keseimbangan jangka Panjang.
2.	Pengaruh Investasi dalam Negeri, Investasi Luar Negeri Terhadap	Variabel Independen: -	Variabel Independen: -	Investasi dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PDRB Provinsi Riau 2010-2020 (Aswanto, 2021)	Variabel Dependen: - PDRB	- Investasi dalam Negeri - Investasi Luar negeri Variabel Dependen: -	PDRB di Provinsi Riau dengan nilai Prob 0,05 artinya ketika investasi dalam negeri meningkat maka PDRB juga akan meningkat. Investasi luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau dengan Prob 0,01 artinya ketika investasi luar negeri meningkat maka PDRB juga akan meningkat.
3.	Pengaruh Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Khusus terhadap PDRB Selatan 2023) (Suranto, 2023)	Variabel Independen: - Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen: - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, secara parsial dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Sedangkan secara simultan,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Variabel Dependen: -	mempunyai pengaruh yang signifikan namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi diatas 60%.
4.	Pengaruh Ekspor, Impor dan Indeks Harga Konsumen terhadap PDRB Provinsi Lampung (Dian Mulyawan dan Ardiansyah Japlani, 2022).	Variabel Independen: - Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen: - Ekspor - Impor - Indeks Harga Konsumen n Variabel Dependen: -	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ekspor berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap PDRB, variabel impor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB, dan variabel indeks harga konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan secara simultan variabel ekspor, impor, dan indeks harga konsumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap PDRB Provinsi Lampung.
5.	Pengaruh Industri, Tenaga Kerja, Jumlah Produksi Galian/Pertambangan Serta Luas Area Perkebunan dan Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (Marwan Sam, dkk 2021).	Variabel Independen: - Jumlah Industri Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen: - Jumlah Tenaga Kerja - Jumlah Produksi Galian/Pertambangan - Luas Area Perkebunan dan Perikanan	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, variabel jumlah industri, jumlah pertambangan, dan luas area perkebunan berpengaruh positif terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Jika penambahan satu unit perusahaan industri di Provinsi Sulawesi Selatan maka akan meningkatkan nilai PDRB sebesar 5,502 milyar rupiah. Jika penambahan jumlah produksi pertambangan sebesar 1 juta m ³ di Provinsi Sulawesi Selatan maka akan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				meningkatkan nilai PDRB sebesar 0,180 milyar rupiah. Sedangkan jika penambahan 1 hektar luas area perkebunan di Provinsi Sulawesi Selatan maka akan meningkatkan nilai PDRB sebesar 1,411 milyar rupiah.
6.	Pengaruh PAD, Jumlah Penduduk, Jumlah Investasi, dan Jumlah Pencari Kerja terhadap PDRB Kabupaten Kuningan (Happy Nurmayanti, dkk 2021).	Variabel Independen: - PAD Variabel Dependen; - PDRB	Variabel Independen: - Jumlah Penduduk - Jumlah Investasi - Jumlah Pencari Kerja Variabel Dependen: -	Berdasarkan penelitian tersebut, secara parsial variabel pencari kerja dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Kuningan sedangkan Variabel PAD, dan jumlah investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Kuningan. Secara simultan variabel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				PAD, jumlah penduduk, jumlah investasi, jumlah pencari kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Kuningan.
7.	Pendekatan Regresi Data Panel untuk Pemodelan Jumlah Angkatan Kerja dan Penanaman Modal Luar Negeri terhadap PDRB Provinsi di Indonesia (M. Sykron dan M. Fahri, 2018).	Variabel Independen: - Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen: - Jumlah Angkatan Kerja - Penanam an Modal Luar Negeri Variabel Dependen: -	Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah angkatan kerja dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi di Indonesia. nilai Adjusted R-square sebesar 99,8556% yang berarti kedua variabel independent dapat menjelaskan variabel respon sebesar 99,8556%.
8.	Pengaruh Kerja, Tenaga Jumlah	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Dari hasil analisis menunjukkan secara

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Perusahaan, dan Biaya Input terhadap PDRB sub Sektor Industri Besar dan Sedang di Sumatera Utara Periode 2001-2015 (Muhammad Taufik, dkk 2018).</p>	<p>- Jumlah Perusahan Variabel</p>	<p>- Tensga Kerja Biaya Input Variabel</p>	<p>- PDRB sub Sektor Industri Besar dan Sedang</p>	<p>parsial bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Variabel jumlah perusahaan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB. Variabel biaya input berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Koefisien determinasi 0,957 yang berarti 95,7% variasi atau perubahan dalam PDRB dapat dijelaskan oleh variasi dari tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan biaya input sedangkan sisanya 4,3% dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lain.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Pengaruh Belanja Angkatan Kemiskinan terhadap kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020 (Elin Awanta Rajagukguk, dkk 2021).	PAD, Daerah, Kerja, PDRB Variabel Independen; - PAD Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen; - Belanja Daerah - Angkatan Kerja - Kemiskinan Variabel Dependen: -	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, variabel PAD tidak berdampak signifikan terhadap PDRB, variabel belanja daerah berpengaruh negative signifikan terhadap PDRB, variabel angkatan kerja dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Secara bersama-sama variabel PAD, belanja daerah, angkatan kerja, kemiskinan berpengaruh terhadap PDRB.
10.	Pengaruh Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-	Indeks Variabel Independen: - Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen: - IPM - Tenaga Kerja Variabel Dependen:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel IPM dan angkatan kerja yang bekerja berpengaruh positif

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2014 (Andini Mulyasari, 2016).		-	dan signifikan terhadap PDRB kab/Kota di Jawa Tengah. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa IPM dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kab/Kota di Jawa Tengah.
11.	Pengaruh Usaha Kecil Menengah dan Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo (Failur Rahman, 2022).	Variabel Independen: - Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen: - Usaha Kecil Menengah Sektor Pariwisata Variabel Dependen: -	Hasil analisis regresi menunjukkan sektor pariwisata dan UMKM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Namun, hanya sektor UMKM yang berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap PDRB sedangkan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				sektor pariwisata secara parsial tidak berpengaruh signifikan.	
12.	Pengaruh Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja terhadap Kabupaten/Kota Jawa Ambarwati dan Payamta, 2015).	PAD, dan Kerja PDRB di (Anik dan	Variabel Independen: - PAD Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen: - Investasi pemerintah Angkatan Kerja Variabel Dependen: -	Berdasarkan uji hipotesis secara parsial yang telah dilakukan ditemukan bahwa PAD dan angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sedangkan variabel investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap PDRB.
13.	Analisis Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap PDRB di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008-2017 (Sulaiman dan Murtala, 2021).	Variabel Independen: - Variabel Dependen; - PDRB	Variabel Independen: - Sektor Industri Pengolahan Bagi Hasil Pajak Variabel Dependen: -	Dapat disimpulkan bahwa kontribusi dari sektor industri pengolahan dengan PDRB di daerah Kabupaten Aceh Utara paling besar terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 16% dari total dari PDRB di daerah Kabupaten Aceh Utara dan yang	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>paling kecil terjadi di tahun 2008 yaitu sebesar 4,09% dari total dari PDRB di daerah Kabupaten Aceh Utara. Rata-rata kontribusi dari sektor industri pengolahan dengan PDRB di daerah Kabupaten Aceh Utara dari kurun waktu 10 tahun terakhir adalah sebesar 11,59%. Secara parsial dapat disimpulkan dana bagi hasil pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan dan juga positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto di daerah Kabupaten Aceh Utara. Dari Uji koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Bagi Hasil Pajak (X) terhadap PDRB di daerah Kabupaten Aceh Utara ialah sebesar 0.252118 atau 25,21%, sementara sisanya yaitu 74,79% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam model penelitian ini.</p>
14.	<p>Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB dan PAD Kota Balikpapan (Johana Rosmalia, dkk, 2014).</p>	<p>Variabel Independen: - Variabel Dependen: - PDRB</p>	<p>Variabel Independen: - Investasi - Tenaga Kerja Variabel Dependen: - PAD</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi, tenaga kerja dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD di Kota Balikpapan. Secara parsial investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB, tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB, PDRB berpengaruh</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				signifikan terhadap PAD, investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD, tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. Kontribusi variabel investasi, tenaga kerja, dan PDRB terhadap PAD sebesar 93,5% berada pada tingkat hubungan yang sangat kuat sedangkan sisanya yaitu 6,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
15.	Pengaruh Jumlah Variabel Penduduk terhadap PDRB di Sulawesi Tenggara (Ayu Fatmasari Tumaleno, 2022).	Variabel Independen: - Variabel Dependen; - PDRB	Variabel Independen: - Jumlah Penduduk Variabel Dependen: -	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Tenggara

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	Pengaruh Investasi Agro Industri dan Tingkat Suku Bunga serta Tenaga Kerja terhadap PDRB dan PAD Kota Samarinda (Siti Maria, 2014).	Variabel Independen: - Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen: - Investasi Agro Industri Tingkat Suku Bunga - Tenaga Kerja Variabel Dependen: - PAD	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa investasi sektor agroindustry, nilai suku bunga, dan jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Samarinda. Kemudian variabel investasi sektor agroindustry, suku bunga kredit, jumlah tenaga kerja dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Samarinda. Kemudian PDRB terbukti signifikan mempengaruhi PAD.
17.	Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap PDRB di	Variabel Independen: - PAD - TPAK	Variabel Independen: - Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD dan belanja modal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Kota Provinsi Tenggara Tahun 2015-2020 (Fatimah Savira, dkk 2021).	Nusa Barat 2015-2020 Savira,	Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Dependen: -	berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2015-2020, sementara variabel tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2015-2020. Secara simultan variabel PAD, belanja modal, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2015-2020.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur (Muhammad Averroes Al-Khawarizmi, 2021).	Variabel Independen: - PAD Variabel Dependen: - PDRB	Variabel Independen: - Dana Perimbangan Variabel Dependen: -	Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel PAD berpengaruh positif terhadap PDRB di Jawa Timur sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur
19.	Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap PDRB per Kapita di Jawa Barat Periode 2011-2020 (Fanni Novianti, 2022)	Variabel Independen: - PAD Variabel Dependen: -	Variabel Independen: - Belanja Modal - Dana Perimbangan Variabel Dependen: - PDRB per kapita	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, belanja modal dan dana perimbangan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap PDRB per kapita di Jawa Barat. Secara parsial, PAD berpengaruh secara positif terhadap PDRB per kapita Jawa Barat, belanja modal tidak

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita Jawa Barat dan dana perimbangan berpengaruh secara positif terhadap PDRB per kapita Jawa Barat.
20.	Analisis Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB di Kabupaten Jayapura (Ayub Tanudy dan Muhamad Syafii, 2021).	Variabel Independen: - Variabel Dependen; - PDRB	Variabel Independen: - Industri Pengolahan Variabel Dependen: -	Hasil perhitungan kontribusi sektor industri pengolahan tahun 2017 mengalami penurunan secara persentase di bandingkan tahun 2016 sebesar 0,7 persen namun dari sisi nilai nominalnya tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagai akibat dari adanya kecenderungan meningkatnya penerimaan dari sektor lainnya, dan ini sekaligus sebagai kontribusi kategori kecil selama lima tahun terakhir. Hasil perhitungan kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2018 mengalami

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>penurunan secara persentase namun tidak pada nilai nominalnya yaitu sebesar 4,79 persen, ini mengalami penurunan sebesar 0,18 persen, serta tetap menunjukkan tren yang positif, hal ini terjadi sebagai akibat dari semakin membaiknya kinerja sektor – sektor ekonomi lainnya yang ada di Kabuten Jayapura.</p>

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka dimunculkan kerangka pemikiran untuk menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah industri, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.

2.2.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan PDRB

Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang erat dengan PDRB suatu daerah, pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan-penerimaan asli yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai

sektor, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan PDRB yaitu, Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai salah satu komponen pendapatan yang menyumbang terhadap PDRB.

Hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan PDRB telah dibuktikan dalam penelitian terdahulu oleh Muhammad Averroes Al-khawarizmi (2021). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Timur. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anik dan Payatma (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Jawa.

2.2.2. Hubungan Jumlah Industri dengan PDRB

Jumlah industri memiliki hubungan yang erat dengan PDRB suatu daerah karena industri berperan sebagai salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap pembentukan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketika jumlah industri di suatu wilayah meningkat, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap PDRB wilayah tersebut, seperti peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan sektor-sektor terkait, serta investasi dan pengembangan infrastruktur.

Hubungan positif antara industri dengan pertumbuhan ekonomi telah dibuktikan dalam penelitian terdahulu oleh Marwan Sam, dkk (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh

Banyaknya Perusahaan Industri, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Produksi Galian/Pertambangan serta Luas Area Perkebunan dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan”, yang menyatakan bahwa variabel jumlah perusahaan industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Selatan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Bunga dan Eddy (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah UMKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

2.2.3. Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan PDRB

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Solow dalam pertumbuhan ekonomi neo klasik menyatakan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang bekerja, maka output yang dihasilkan akan semakin tinggi. Semakin banyak output yang dihasilkan, maka akan mendorong tingkat penawaran agregat sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana dengan baik jika jumlah dan kualitas tenaga kerja itu baik. Dengan kualitas tenaga kerja yang baik, maka akan menghasilkan angkatan kerja yang baik pula (Sukirno, 2004:56). Selain itu dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat produksi Provinsi Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia dan Yusnida (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Tenaga Kerja, UMP, dan PAD terhadap PDRB perkapita di Wilayah Sumatera 2010-2020”, yang menyatakan bahwa variabel tenaga kerja

berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Elin, dkk (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Angkatan Kerja, Kemiskinan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Periode 2017-2020”, yang menyatakan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

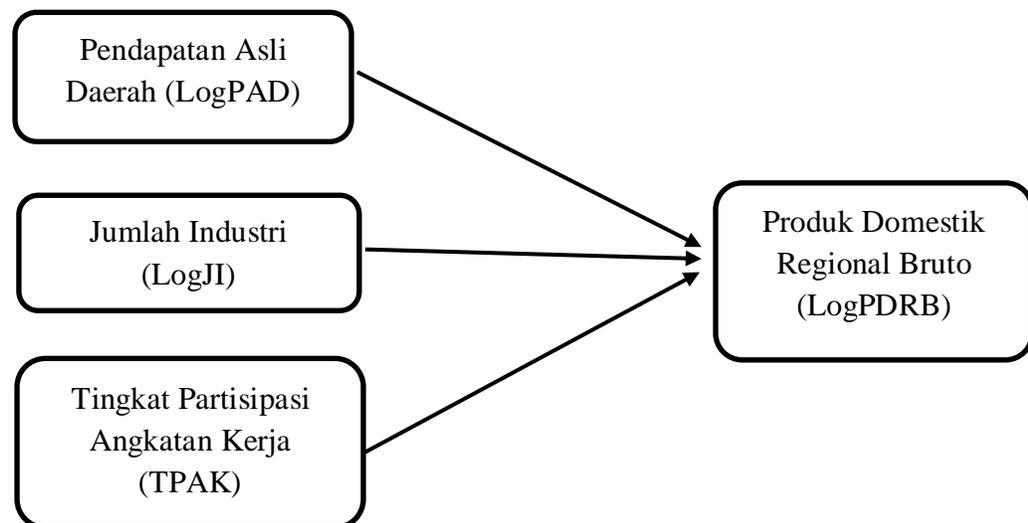
Berdasarkan teori dan juga penelitian yang telah dipaparkan, maka hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto adalah positif, karena semakin banyak partisipasi angkatan kerja yang bekerja, maka tingkat produksi akan meningkat yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah industri, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

2.3. Diagram Kerangka Pemikiran

Diagram untuk kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang berdasarkan hasil dari data yang telah di input dan digambarkan ke dalam bentuk diagram bergaris. Dengan di buatnya diagram yang bertujuan untuk melihat data agar lebih mudah dalam pendataan secara keseluruhan dan lebih sederhana dalam pendataan. Maka hubungan secara teoritis di atas dapat

dibuatkan dalam model yang sederhana dan sistematis yang disajikan seperti pada gambar 2.1 sebagai berikut



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Industri, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.

2. Diduga secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Industri, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.